

MANAJEMEN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM RANGKA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI KOTA PARIAMAN

Azizah Rahmadhani, Afriva Khaidir

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

E-mail : azizahrahmadhaniijjah@gmail.com
af.khaidir@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

The Management of the City Without Slums (KOTAKU) Program in the Context of Structuring the Pariaman City Settlement Environment is the subject of this study. The goal of this study is to describe the City Without Slums Program's (KOTAKU) administration and the impact of its execution. This study, which was done in Pariaman City, takes a qualitative method through descriptive research. Data were gathered by observation, interviews, and documentation studies; additionally, this research was tested using source triangulation techniques. Informants are identified through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The following processes are examined using management theory: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. The findings of this study reveal that while the management of the City Without Slums Program (KOTAKU) is rather functional, several areas, such as the lack of community participation in the program planning process, might be improved. Additionally, there are implications associated with the KOTAKU program's implementation, including enhanced access to infrastructure and supply of basic services.

Keywords: *ProgramManagement, Environment Arrangement, Settlement*

ABSTRAK

Pengelolaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dikaji dalam rangka penataan Lingkungan Permukiman Kota Pariaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan dampaknya. Penelitian yang dilakukan di Kota Pariaman ini menggunakan teknik kualitatif melalui penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi; juga, penelitian ini diuji menggunakan pendekatan triangulasi sumber. Informan diidentifikasi melalui pengumpulan data, reduksi, visualisasi, dan penarikan suatu kesimpulan. Dari penelitian ini memakai teori manajemen dengan cara sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, perolehan tenaga kerja, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun pengelolaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sangat efektif, bidang lain, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program, mungkin memerlukan perbaikan. Selain itu,

ada implikasi terhadap pelaksanaan program KOTAKU, seperti peningkatan akses infrastruktur dan penyediaan layanan dasar.

Kata kunci: Manajemen Program, Penataan Lingkungan, Permukiman

Pendahuluan

Perkembangan penduduk yang sangat padat di perkotaan dan kacamata, serta kemiskinan, tingkat kejahatan, serta adanya permukiman kumuh yang berada di tanah-tanah yang kosong, seperti disepanjang sungai, jalur kereta api dan taman kota maupun di bawah jalan layang (Jamaludin, 2015). Permukiman kumuh kerap dilihat sebagai kawasan yang acuh tak acuh dan jugasebagai kawasan yang apatis, jumlah penduduk yang tinggi, tidak sehat dan masih adaperspektif negatif lainnya (Adisasmita, 2010).

Globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, dan sistem pemerintahan semuanya harus dimasukkan ke dalam paradigma desain perkotaan yang baru. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diharapkan pengambilan kebijakan dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah menjadi Good Urban Governance, artinya aparatur akan mampu merespon secara efektif dan bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan pembangunan di kawasan perkotaan bekerjasama dengan warga masyarakat (Etty, 2007). Kepadatan penduduk di kota-kota besar berdampak buruk bagi ekosistem di sekitarnya, menciptakan kawasan kumuh yang dapat menyebarkan banyak penyakit dan menguras sumber daya alam.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak memiliki lingkungan makmur yang kondusif untuk tempat tinggal manusia. Ciri-cirinya antara lain bangunan besar dan sangat tinggi yang terkonsentrasi di kawasan tertentu, sehingga mengakibatkan permukiman tidak teratur (Evaluasi RW Kumuh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, 2011). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Pasal 1 UU Perumahan serta Permukiman 2011. Perumahan yaitu "sekelompok rumah yang merupakan bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan infrastruktur, utilitas, dan layanan publik." Salah satu tantangan yang dihadapi pembangunan perumahan di Indonesia adalah meluasnya permukiman kumuh ilegal yang melanggar undang-undang penataan ruang. Permukiman pada hakekatnya berkaitan dengan kehidupan penduduk melalui kebutuhan atau kepentingan.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat pemberantasan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100" yang mengadvokasi 100 persen akses terhadap air minum yang aman, nol persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses terhadap sanitasi yang layak. KOTAKU dilaksanakan melalui kebijakan dan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, dan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya, dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana utama.

Pemerintah menyelenggarakan program KOTAKU sesuai dengan peraturan atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Inisiatif KOTAKU diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Tentu saja, program ini didampingi oleh seorang fasilitator yang disebut KorKot (Koordinator Kota), yang berperan melakukan pengawasan di tingkat masyarakat. Sedangkan Bappeda berfungsi sebagai koordinator pemerintah daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Sejak 2016, Kota Pariaman telah merasakan manfaat dari inisiatif KOTAKU. Kemudian, pada tahun 2017, Kota Pariaman memperoleh bantuan pembiayaan investasi dari pemerintah pusat melalui program KOTAKU untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas lingkungan kumuh berskala lingkungan yang berada di kecamatan/desa. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Pengembangan Kawasan Perumahan. Inisiatif KOTAKU terutama digunakan untuk membuat jalan dan sistem drainase yang ramah lingkungan untuk mengatasi masalah kawasan kumuh. Kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman berskala lingkungan ini melibatkan pelibatan masyarakat sepanjang proses, mulai dari perencanaan hingga penggunaan dan pemeliharaan. Pada 2019, dimungkinkan untuk mewujudkan Kota Pariaman yang bebas kumuh.

Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan program KOTAKU di kelurahan Kota Pariaman ini tidak berjalan dengan optimal. Pembangunan infrastruktur permukiman skala lingkungan seperti jalan lingkungan dan drainase tersebut tidak terpelihara dengan baik. Kondisi saluran drainase yang tidak terpelihara terlihat dari banyaknya sampah pada saluran drainase, air yang tidak mengalir dan berbau, pasangan batu saluran yang rusak dan sudah banyak ditumbuhi rumput. Jalan lingkungan yang telah dibangun terlihat juga tidak terpelihara dimana badan jalan sudah banyak ditumbuhi rumput, permukaan jalan yang sudah rusak dan pada permukaan jalan bertebaran sampah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kota Pariaman. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan menggunakan strategi purposive sample untuk mengidentifikasi responden penelitian. Keaslian data ditentukan menggunakan triangulasi sumber dan metode, dan proses analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil Dan Pembahasan

1. Sistem Manajemen Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Rangka Penataan Lingkungan Permukiman di Kota Pariaman

- a) Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Rangka Penataan Lingkungan Permukiman di Kota Pariaman



Perencanaan adalah proses menetapkan apa yang perlu dilakukan dengan cara yang memungkinkan organisasi atau lembaga untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut temuan peneliti lapangan, perencanaan inisiatif Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Sejak tahun 2016, program KOTAKU telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 02/PRT/M/2016. Dinas Perencanaan dan Pengembangan Kota Pariaman, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, semuanya turut andil dalam perencanaan KOTAKU ini. Pariaman, kelurahan, dan pemerintah di tingkat komunal.

b) Pengorganisasian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Rangka Penataan Lingkungan Permukiman di Kota Pariaman

Pengorganisasian merupakan penentuan struktur otoritas formal dan mengatur sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi atau instansi tersebut. Berdasarkan dari hasil suatu penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian terkait program KOTAKU ini sudah terbentuk dengan sebagaimana mestinya. Adapun pembentukannya yaitu, Dinas Bappeda selaku koordinator yang akan mengkoordinir bagaimana jalannya program tersebut. Ditingkat kelurahan dibentuk BKM/LKM, kelurahan mengadakan acara rembuk dengan masyarakat terkait program KOTAKU dan membentuk panitia dengan istilah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), KSM inilah yang juga ikut dalam pelaksanaan program.

c) Pengadaan Tenaga Kerja Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Rangka Penataan Lingkungan Permukiman di Kota Pariaman

Pengadaan tenaga kerja adalah aktivitas yang tentunya berkaitan dengan pemilihan siapa-siapa yang melakukan semua pekerjaan atau kegiatan, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada SDM yang sudah terpilih. Berdasarkan dari hasil suatu penelitian yang didapat dari peneliti di lapangan memperlihatkan bahwa pengadaan tenaga kerja program KOTAKU sudah efektif karena adanya pelatihan yang diberikan, sehingga SDM atau tenaga kerja tersebut nantinya dapat melakukan tugasnya dengan baik. Pelatihan merupakan proses yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berujung pada peningkatan kinerja.

d) Pengarahan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Rangka Penataan Lingkungan Permukiman di Kota Pariaman

Pengarahan adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya dalam bimbingan, memberikan petunjuk, saran-saran, perintah-perintah, dan instruksi agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terlaksana. Selaku koordinator di tingkat kota, (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Bappeda memberikan arahan kepada bawahannya atau kepada KSM dan stakeholder yang ikut terlibat dalam pelaksanaan suatu program KOTAKU dengan cara mengadakan rapat bulanan atau pertemuan



untuk membahas progress dari program yang dijalankan tersebut. Pada pertemuan itulah Bappeda akan menanyakan apa kendala dari masing-masing SDM dan nantinya akan diberikan saran-saran dan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu, Bappeda juga melakukan monitoring ke lapangan dan melihat secara langsung bagaimana proses dalam pelaksanaan program yang dijalankan.

e) Pengkoordinasian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Rangka Penataan Lingkungan Permukiman di Kota Pariaman

Koordinasi merupakan penyesuaian yang teratur dari upaya yang dilakukan untuk melaksanakan pengaturan waktu pada hasil implementasi yang sesuai dan bersatu untuk mencapai suatu tujuan. Koordinasi yang dilakukan dalam Program KOTAKU ini adalah dengan mengadakan pertemuan dengan yang berkepentingan dan membahas serta memaparkan hasil dari kegiatan yang dijalankan, dan menjelaskan sudah sejauh mana hasil dari pelaksanaan tersebut. Tujuan Bappeda dalam melaksanakan fungsi ini agar terjalinnya hubungan yang harmonis antara stakeholder yang melaksanakan Program KOTAKU, sehingga nantinya tidak ada kesalahpahaman atau tumpang tindih. Dengan adanya koordinasi yang baik maka tujuan dari program KOTAKU pun akan terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

f) Penganggaran Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Rangka Penataan Lingkungan Permukiman di Kota Pariaman

Penganggaran mencakup semua tindakan yang melibatkan perencanaan, perhitungan, dan pengelolaan anggaran. Anggaran ini juga berkaitan dengan laporan keuangan di organisasi atau instansi, baik itu laporan uang masuk ataupun uang keluar. Pada Program KOTAKU ini, anggaran atau dana sebesar 10-16 milyar tersebut diberikan langsung oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada KSM atau lembaga yang melaksanakan program KOTAKU yang dibentuk oleh kelurahan.

g) Pelaporan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Rangka suatu penataan terhadap Lingkungan Permukiman di Kota Pariaman

Pelaporan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan laporan dari setiap kegiatan apakah ada kendala atau masalah serta bagaimana situasi yang terjadi dalam melaksanakan program tersebut. Laporan hasil akhir Program KOTAKU dibuat langsung oleh Korkot dan langsung dikirimkan kepada Kementerian PUPR. Adapun laporan yang dibuat oleh Korkot ini adalah menjelaskan tentang hasil akhir dari program yang sudah dijalankan, baik tentang uang masuk atau uang keluar dan lampiran-lampiran yang mendukung. Laporan ini juga merupakan bukti bahwa program tersebut sudah dijalankan karena laporan tersebut berisikan fakta yang akurat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat dikemukakan hal-hal berikut mengenai Sistem Manajemen Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Rangka Penataan Lingkungan Permukiman Di Kota Pariaman, sebagai berikut:

1. Sistem Manajemen Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat digambarkan sebagai fungsi pengelolaan yang dicakupnya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pencarian sumber daya, pembinaan, pengkoordinasian, penganggaran, dan pelaporan.
2. Dampak dari pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini adalah dapat mengurangi kawasan kumuh di permukiman masyarakat dan dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkungan, pembangunan drainase, pembangunan mck dan penyediaan sarana pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perkotaan "Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya"*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wimardana, A. S. (2016). *Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), C166-C171.
- Etty, Soesilowati. 2007. *Kebijakan Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban*. *Jurnal Ekonomid dan Manajemen*. Volume 16. Nomor 1
- Vicky, H. Makarau. 2011. *Penduduk, Perumahan Pemukiman Perkotaan Dan Pendekatan Kebijakan*. *Jurnal Sabua* Vol.3, No.1: 53-57
- Herdiansyah, H., Haryanto, J. T., & Alwini, A. F. (2018). Urban Governance Management Towards Managing Slum Area in Indonesian Cities. *Matra Pembaruan*, 2(2), 111-121. <https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.111-121>
- Putri, R. F., Abadi, A. W., & Tastian, N. F. (2020). Impacts of Population Density for Landuse Assessment in Cengkareng, West Jakarta. *Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology*, 5(2), 56-67. <https://doi.org/10.25299/jgeet.2020.5.2.3705>
- Suharsimi Arikunto, dkk. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
- [Kotaku : Kota Tanpa Kumuh \(pu.go.id\)](http://pu.go.id)